



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0120/BAG. HUKUM/2025

TENTANG

PERENCANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Bupati yang adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Bupati yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pembentukan Peraturan Bupati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala, perlu adanya prosedur penyusunan peraturan Bupati yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan sistematis;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

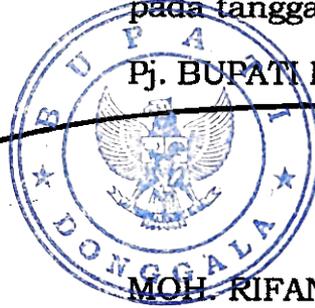
Menetapkan :

- KESATU** : Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan hasil verifikasi Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati yang diusulkan perangkat daerah pemrakarsa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI DONGGALA,



MOH. RIFANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ /BAG. HUKUM/2025
TENTANG
PERENCANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TAHUN 2025

NO	JENIS	TENTANG	POKOK MATERI	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET.
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PERATURAN BUPATI	BESARAN PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025	PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025	BARU		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	JANUARI TAHUN 2025	
2.	PERATURAN BUPATI	PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU	PENGATURAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	BAGIAN EKONOMI	JANUARI TAHUN 2025	
3.	PERATURAN BUPATI	PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DI KABUPATEN DONGGALA	PENGATURAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DI KABUPATEN DONGGALA	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	BAGIAN EKONOMI	JANUARI TAHUN 2025	
4.	PERATURAN BUPATI	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMBILAN CONTOH UJI KUALITAS LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DONGGALA	MENGATUR PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMBILAN CONTOH UJI KUALITAS LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DONGGALA	BARU		UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	FEBRUARI TAHUN 2025	
5.	PERATURAN BUPATI	PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2025	PEDOMAN DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	BARU		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BAGIAN ORGANISASI	MARET TAHUN 2025	
6.	PERATURAN BUPATI	RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TANANTOVEA	RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TANANTOVEA	BARU		PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RTRW TAHUN 2022-2042	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	MARET TAHUN 2025	

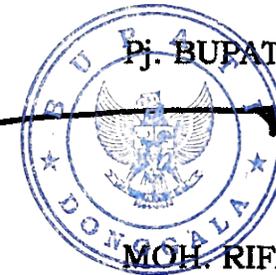
7.	PERATURAN BUPATI	PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN DONGGALA	PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN DONGGALA	BARU		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	MARET TAHUN 2024	
8.	PERATURAN BUPATI	POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN DONGGALA	PENGATURAN TERHADAP POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN DONGGALA	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	DINAS KESEHATAN	MARET TAHUN 2025	
9.	PERATURAN BUPATI	STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP KABUPATEN DONGGALA	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP KABUPATEN DONGGALA	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	DINAS KESEHATAN	MARET TAHUN 2025	
10.	PERATURAN BUPATI	RENCANA STRATEGIS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024-2029	PEDOMAN RENCANA STRATEGIS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024-2029	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	DINAS KESEHATAN	MARET TAHUN 2025	
11.	PERATURAN BUPATI	PEMBAGIAN JASA LAYANAN PADA UOBK BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABELOTA KABUPATEN DONGGALA	PENGATURAN TERHADAP PEMBAGIAN JASA LAYANAN PADA UOBK BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABELOTA KABUPATEN DONGGALA	BARU		UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT	RSUD KABELOTA	MARET TAHUN 2025	
12.	PERATURAN BUPATI	RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI KABUPATEN DONGGALA	PEDOMAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI KABUPATEN DONGGALA	BARU		UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	MARET TAHUN 2025	
13.	PERATURAN BUPATI	PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	PEDOMAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	BARU		PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	MARET TAHUN 2025	
14.	PERATURAN BUPATI	PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PAKAIAN SERAGAM BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN DONGGALA	PEDOMAN TERHADAP PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PAKAIAN SERAGAM BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN DONGGALA	BARU		PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	MARET TAHUN 2025	
15.	PERATURAN BUPATI	PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL	PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL	BARU		PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 79 TAHUN 2014 TENTANG MUATAN LOKAL KURIKULUM 2013	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	MARET TAHUN 2025	
16.	PERATURAN BUPATI	PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA	TERWUJUDNYA INFORMASI ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI	BARU		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	APRIL TAHUN 2024	
17.	PERATURAN BUPATI	PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU TUNJANGAN KEPADA PEJABAT	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	APRIL TAHUN 2024	

						ATAU PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
18.	PERATURAN BUPATI	ANALISIS STANDAR BELANJA	PENGATURAN TERHADAP ANALISIS STANDAR BELANJA	BARU		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	APRIL TAHUN 2024	
19.	PERATURAN BUPATI	SEWA KENDARAAN	PENGATURAN TERHADAP SEWA KENDARAAN	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	APRIL TAHUN 2024	
20.	PERATURAN BUPATI	STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA	MENGATUR STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	APRIL TAHUN 2024	
21.	PERATURAN BUPATI	PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU	PENGATURAN TERHADAP PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU	BARU		PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL	DINAS SOSIAL	APRIL TAHUN 2025	
22.	PERATURAN BUPATI	PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL	PEDOMAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL	BARU		PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI DAERAH PROVINSI DAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS SOSIAL	APRIL TAHUN 2025	
23.	PERATURAN BUPATI	PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT TERPENCIL	PENGATURAN TERHADAP PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT TERPENCIL	BARU		PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 186 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	DINAS SOSIAL	APRIL TAHUN 2025	
24.	PERATURAN BUPATI	MEKANISME PENETAPAN MASYARAKAT YANG MASUK KRITERIA MISKIN	MENGATUR MEKANISME PENETAPAN MASYARAKAT YANG MASUK KRITERIA MISKIN	BARU		PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL	APRIL TAHUN 2025	
25.	PERATURAN BUPATI	PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER)	MENDUKUNG PERAN DAN LAYANAN APIP	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	INSPEKTORAT	MEI TAHUN 2024	
26.	PERATURAN BUPATI	RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	MENGATUR RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	BARU		PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	MEI TAHUN 2024	
27.	PERATURAN BUPATI	PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU	PENGATURAN TERHADAP PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENDAU TAMBU	BARU		UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG KESEHATAN	RSUD PENDAU TAMBU	MEI TAHUN 2024	
28.	PERATURAN	PERATURAN PELAKSANA	PENGATURAN TERHADAP	BARU		PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN	BADAN	MEI TAHUN	

	BUPATI	PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			2022 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2024	
29.	PERATURAN BUPATI	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2026	MEMBERIKAN KESERAGAMAN PEMAHAMAN DAN TINDAKAN BAGI PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA MAUPUN PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	JUNI TAHUN 2025	
30.	PERATURAN BUPATI	RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	MENGATUR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	BARU		UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	JUNI TAHUN 2025	
31.	PERATURAN BUPATI	RENCANA KERJA TAHUN 2026	PEDOMAN TERHADAP RENCANA KERJA TAHUN 2026	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	JUNI TAHUN 2025	
32.	PERATURAN BUPATI	PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025	PEDOMAN TERHADAP PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	JUNI TAHUN 2025	

						DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH		
33.	PERATURAN BUPATI	RENCANA AKSI DAERAH PANGAN GIZI	PENGATURAN TERHADAP RENCANA AKSI DAERAH PANGAN GIZI	BARU		PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN STRATEGIS PANGAN DAN GIZI	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	JUNI TAHUN 2025
34.	PERATURAN BUPATI	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025-2029	PEDOMAN TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025-2029	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	JUNI TAHUN 2025
35.	PERATURAN BUPATI	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025	PENGATURAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	JULI TAHUN 2024
36.	PERATURAN BUPATI	TATA NASKAH DINAS DESA	PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DESA	BARU		UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	SEPTEMBER TAHUN 2025
37.	PERATURAN BUPATI	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026	LANDASAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026	BARU		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	NOVEMBER TAHUN 2025
38.	PERATURAN BUPATI	TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2026	PENGATURAN TERHADAP TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2026	BARU		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	NOVEMBER TAHUN 2025

						TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA		
39.	PERATURAN BUPATI	TATA CARA PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026	PENGATURAN TERHADAP TATA CARA PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026	BARU		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	NOVEMBER TAHUN 2025



Pj. BUPATI DONGGALA,

MOH. RIFANI